

Analisis Perencanaan Anggaran Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Papua Tengah

Mathius Jeli^{1*}, Baharuddin², Mika Malissa³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail: mathiusjeli1982@gmail.com*

*Penulis korespondensi

Abstrak

Perencanaan anggaran merupakan faktor kunci dalam menjamin ketersediaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai guna mendukung efektivitas penanggulangan kebakaran dan bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan anggaran pengadaan peralatan pemadam kebakaran pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, serta mengidentifikasi kendala dan tingkat efektivitasnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun berdasarkan kebutuhan operasional dasar, namun belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Kendala utama meliputi keterbatasan alokasi anggaran, analisis kebutuhan peralatan yang belum komprehensif, kompleksitas prosedur pengadaan, serta kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi anggaran. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pengadaan serta ketidaksesuaian jenis dan jumlah peralatan dengan karakteristik wilayah dan risiko kebakaran. Penelitian ini merekomendasikan penguatan analisis kebutuhan berbasis risiko, peningkatan koordinasi antarbidang, serta optimalisasi pengelolaan anggaran agar pengadaan peralatan pemadam kebakaran dapat mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik dan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: perencanaan anggaran, pengadaan, peralatan pemadam kebakaran, efektivitas anggaran, sektor publik.

Abstract

Budget planning plays a critical role in ensuring the availability of adequate fire-fighting equipment to support effective fire and disaster management. This study aims to analyze the budget planning process for the procurement of fire-fighting equipment at the Fire and Rescue Service, Disaster Management Agency, and Civil Service Police Unit of Central Papua Province, as well as to identify its constraints and effectiveness. A qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation review of regional planning and budgeting documents. The findings indicate that budget planning has been formulated based on basic operational needs; however, it has not fully reflected actual field requirements. Major constraints include limited budget allocation, insufficiently comprehensive needs analysis, complex procurement procedures, and weak synchronization between budget planning and realization. These conditions have led to delays in procurement and mismatches between the type and quantity of equipment and the region's geographical characteristics and fire risk profile. This study recommends strengthening risk-based needs assessment, improving inter-departmental coordination, and optimizing budget management to enhance the effectiveness of fire-fighting equipment procurement and to support sustainable improvements in public service performance and community safety.

Keywords: budget planning, procurement, fire-fighting equipment, budget effectiveness, public sector.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran dan proses pengadaan barang/jasa, terutama pada sektor yang bersifat responsif seperti pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana (Rakhman, 2022). Perencanaan anggaran merupakan proses strategis yang menjabarkan kebutuhan sumber daya, prioritas program, dan alokasi biaya agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan akuntabel (Adelia & Samukri, 2025). Dalam konteks sektor publik, perencanaan yang kurang komprehensif berpotensi menghasilkan alokasi yang tidak mencerminkan kebutuhan operasional riil, sehingga kinerja pengadaan dan realisasi anggaran menjadi kurang optimal.

Di banyak wilayah di Indonesia, perencanaan dan penganggaran untuk pengadaan peralatan pemadam kebakaran menghadapi tantangan signifikan. Misalnya, pada beberapa Dinas Pemadam Kebakaran, realisasi anggaran cenderung rendah dibanding target, mencerminkan kendala dalam penyusunan dan penyerapan anggaran belanja (Tabel 1) serta menunjukkan variasi efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan (2018–2022)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Realisasi (%)
2018	6.143.037.152	5.784.953.922	94
2019	6.709.888.193	6.088.513.316	90
2020	5.947.325.293	5.385.107.873	90
2021	6.177.951.582	5.629.708.232	91
2022	7.453.270.294	6.982.526.014	93

Sumber: Siagian et al. (2024)

Kesenjangan antara anggaran yang dialokasikan dengan kebutuhan riil di lapangan sering muncul karena perencanaan anggaran belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas tugas layanan kebakaran, karakteristik geografis wilayah, serta dinamika risiko bencana (Waring, 2025). Studi empiris dalam konteks pemerintahan daerah menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang baik berkontribusi signifikan pada tingkat serapan anggaran yang lebih tinggi dan pencapaian target program, sedangkan perencanaan yang kurang memadai terkait dengan

rendahnya efektivitas penggunaan anggaran (Adelia & Samukri, 2025; Karikarti et al., 2025).

Lebih jauh, perencanaan anggaran yang tidak didukung oleh analisis kebutuhan berbasis risiko dan konsolidasi pengadaan barang/jasa dapat menyebabkan kurangnya kesesuaian antara jenis dan jumlah peralatan dengan kebutuhan operasional, sehingga berdampak pada kesiapsiagaan dan respons layanan darurat (Rakhman, 2022). Dugaan ketidaksesuaian ini juga teridentifikasi dalam literatur perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baru-baru ini menyoroti kebutuhan formulasi dokumen yang lebih sistematis untuk mendukung value-for-money dalam pengadaan publik (Paembonan et al., 2024).

Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat celah signifikan antara perencanaan anggaran dan kebutuhan riil dalam penyediaan peralatan pemadam kebakaran, yang berimplikasi pada rendahnya efektivitas pengadaan serta potensi hambatan dalam respons layanan kebakaran dan bencana. Mengingat peran krusial anggaran sebagai instrumen kebijakan publik dalam mewujudkan pelayanan keselamatan masyarakat, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan empiris terkait kualitas perencanaan anggaran, tantangan pengadaan, dan dampaknya terhadap efektivitas penggunaan anggaran di sektor layanan keselamatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan anggaran pengadaan peralatan pemadam kebakaran berlangsung di instansi yang diteliti?
2. Apa saja kendala utama dalam perencanaan anggaran dan pengadaan peralatan pemadam kebakaran?
3. Sejauh mana perencanaan anggaran yang ada mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan dalam meningkatkan efektivitas pengadaan peralatan pemadam kebakaran?

TINJAUAN LITERATUR

Teori Perencanaan Anggaran Sektor Publik

Perencanaan anggaran merupakan proses strategis dalam manajemen keuangan publik yang bertujuan mengalokasikan sumber daya secara rasional untuk mencapai tujuan organisasi dan

kepentingan publik (Mardiasmo et al., 2008). Dalam sektor publik, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat kebijakan (policy instrument) yang merefleksikan prioritas pemerintah dan kebutuhan masyarakat (Robinson, 2007).

Pangaribuan (2019) menegaskan bahwa perencanaan anggaran yang efektif harus memenuhi prinsip kesesuaian antara tujuan, program, dan alokasi sumber daya. Ketidaktepatan dalam perencanaan berpotensi menyebabkan inefisiensi, rendahnya serapan anggaran, serta kegagalan pencapaian output dan outcome program. Dalam konteks pemerintah daerah, perencanaan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) menjadi pendekatan dominan untuk memastikan bahwa belanja publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (OECD, 2025).

Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan rangkaian kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan anggaran, pemilihan penyedia, hingga evaluasi hasil pengadaan (Panggalo et al., 2025; Tandibua et al., 2025). Pengadaan yang efektif harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan value for money (OECD, 2019).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama pada sektor dengan tingkat risiko operasional tinggi seperti layanan darurat dan kebencanaan (Panggalo et al., 2025). Perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan riil sering menghasilkan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak tepat waktu, sehingga mengurangi efektivitas pelayanan publik (Aisyah et al., 2024).

Efektivitas Perencanaan Anggaran

Efektivitas perencanaan anggaran merujuk pada kemampuan proses perencanaan dalam menghasilkan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan nyata serta mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi (Medea et al., 2024; Randan et al., 2025). Indikator efektivitas anggaran meliputi ketepatan alokasi, kesesuaian dengan kebutuhan operasional, tingkat realisasi, dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik (Medea et al., 2024; Pidjer et al., 2025).

Dalam konteks penanggulangan kebakaran, efektivitas perencanaan anggaran sangat bergantung pada analisis risiko kebakaran, karakteristik wilayah, dan kesiapan sumber daya (Siagian et al., 2024). Ketidaksesuaian antara anggaran dan kebutuhan lapangan berpotensi menurunkan kapasitas respons serta meningkatkan risiko kerugian akibat kebakaran dan bencana (Rakhman, 2022).

Peran Dinas Kebakaran dan Satpol PP dalam Penanggulangan Bencana

Dinas Kebakaran dan Penyelamatan memiliki peran utama dalam respons darurat, mitigasi risiko, dan perlindungan keselamatan masyarakat. Satpol PP berperan sebagai pendukung dalam penegakan ketertiban, pengamanan lokasi, serta koordinasi lintas sektor saat terjadi bencana (Adelia & Samukri, 2025).

Literatur kebencanaan menekankan bahwa kesiapan institusi penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kesesuaian sarana-prasarana yang diperoleh melalui proses perencanaan dan pengadaan yang efektif (Rakhman, 2022; Siagian et al., 2024). Oleh karena itu, perencanaan anggaran pengadaan peralatan pemadam kebakaran menjadi elemen kunci dalam sistem manajemen bencana daerah.

Definisi Operasional Konsep Kunci

Untuk memperjelas fokus penelitian, konsep-konsep utama didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

- **Perencanaan Anggaran:** proses penyusunan rencana alokasi anggaran pengadaan peralatan pemadam kebakaran berdasarkan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan fiskal daerah.
- **Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran:** proses pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- **Efektivitas Perencanaan Anggaran:** tingkat kesesuaian antara perencanaan anggaran, realisasi pengadaan, dan kebutuhan operasional di lapangan.
- **Kebutuhan Riil Lapangan:** kebutuhan aktual peralatan pemadam kebakaran yang ditentukan oleh risiko kebakaran, kondisi geografis, dan kapasitas operasional.

Penelitian Terdahulu

Berbagai studi empiris telah mengevaluasi hubungan antara perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta efektivitas anggaran dalam konteks pemerintahan daerah maupun lembaga publik lainnya. (Adelia & Samukri (2025) menemukan bahwa perencanaan anggaran yang disusun secara komprehensif dan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif memberikan dampak positif signifikan terhadap serapan anggaran pemerintah daerah, yang menunjukkan pentingnya integrasi antara perencanaan dan pengadaan dalam mencapai realisasi anggaran yang optimal.

Penelitian di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, menunjukkan bahwa kualitas perencanaan menjadi faktor penting untuk realisasi efektif anggaran belanja daerah (Nirwayadhi & Trisna Dewi, 2025).

Masih dalam konteks pemerintahan daerah, Christofer & Darmawati (2024) menguji beberapa faktor termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun faktor revisi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan, perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa secara parsial tidak menunjukkan pengaruh yang konsisten pada semua indikator, menggambarkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran.

Selain itu, studi kuantitatif di Provinsi Salatiga menemukan bahwa perencanaan anggaran secara signifikan mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran, sedangkan pengadaan barang dan jasa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam konteks tersebut, memperlihatkan bahwa hubungan antara pengadaan dan penyerapan anggaran dapat bervariasi tergantung konteks organisasi dan manajemen internal (Puluala, 2021).

Penelitian pada Pemerintah Kabupaten Sorong juga mengevaluasi determinan penyerapan anggaran yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa dan kompetensi sumber daya manusia (Medea et al., 2024; Wamuar et al., 2025). Temuan menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan, sedangkan perencanaan anggaran

secara terpisah tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam konteks tersebut.

Sebagian besar studi menunjukkan perencanaan anggaran memiliki pengaruh penting terhadap efektivitas realisasi anggaran, sementara hasil terkait pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan/efektivitas anggaran masih bervariasi. Hal ini mencerminkan adanya dinamika kontekstual dalam proses perencanaan dan implementasi anggaran di sektor publik, serta menegaskan perlunya penelitian yang fokus mengevaluasi keterkaitan antara perencanaan anggaran, pengadaan spesifik (mis. peralatan pemadam kebakaran), dan kebutuhan operasional riil di wilayah yang menjadi objek studi — aspek yang masih relatif terbatas dalam penelitian sebelumnya dan menjadi ruang kontribusi penelitian ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses perencanaan anggaran pengadaan peralatan pemadam kebakaran, termasuk dinamika kebijakan, praktik administratif, serta kendala yang dihadapi dalam konteks organisasi sektor publik. Desain studi kasus digunakan karena objek penelitian bersifat spesifik, kontekstual, dan terikat pada satu organisasi perangkat daerah dalam wilayah tertentu, sehingga memungkinkan eksplorasi fenomena secara komprehensif dan mendalam (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan perangkat daerah hasil pemekaran wilayah yang menghadapi tantangan nyata dalam perencanaan anggaran dan pengadaan peralatan pemadam kebakaran, baik dari sisi keterbatasan anggaran, kesiapan kelembagaan, maupun karakteristik geografis wilayah. Penelitian dilaksanakan selama bulan Oktober – Desember tahun 2025, mencakup proses pengumpulan data lapangan, penelaahan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta analisis data secara bertahap.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran dan pengadaan peralatan pemadam kebakaran di lingkungan dinas terkait.

Mengingat penelitian bersifat kualitatif, penentuan informan tidak dilakukan melalui teknik sampling statistik, melainkan menggunakan teknik purposive sampling (Memon et al., 2025). Informan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan. Informan penelitian terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional, serta pelaksana teknis, termasuk sekretaris dinas, kepala bidang penanggulangan kebakaran, pejabat perencanaan dan keuangan, serta personel operasional pemadam kebakaran. Teknik ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman informasi dibandingkan jumlah responden (Patton, 2015; Sugiyono, 2020).

Data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci untuk menggali informasi mengenai mekanisme perencanaan anggaran, proses pengambilan keputusan, kendala yang dihadapi, serta persepsi efektivitas perencanaan anggaran pengadaan peralatan pemadam kebakaran. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan sekaligus fleksibilitas untuk mengeksplorasi isu-isu yang berkembang selama proses wawancara (Creswell & Poth, 2018). Selain itu, observasi dilakukan untuk memahami konteks kerja dan dinamika organisasi yang tidak selalu terungkap melalui wawancara.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan realisasi anggaran, dokumen pengadaan, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perencanaan dan penganggaran. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk melengkapi dan memverifikasi data primer, serta memberikan gambaran objektif mengenai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran (Bowen, 2009).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan proses perencanaan anggaran, kendala yang

dihadapi, serta tingkat efektivitasnya. Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori perencanaan anggaran, manajemen pengadaan, serta hasil penelitian terdahulu. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, yang merupakan organisasi perangkat daerah hasil pembentukan provinsi baru. Instansi ini memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, serta penegakan ketertiban umum di wilayah Provinsi Papua Tengah yang memiliki karakteristik geografis luas, topografi beragam, dan tingkat aksesibilitas yang relatif terbatas. Kondisi tersebut menuntut ketersediaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai, baik dari segi jumlah, jenis, maupun kesiapan operasional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas ini bergantung pada proses perencanaan anggaran daerah yang disusun setiap tahun melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Namun, sebagai daerah otonom baru, instansi ini masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, termasuk keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem perencanaan pengadaan peralatan pemadam kebakaran. Kondisi inilah yang menjadi konteks utama dalam menganalisis efektivitas perencanaan anggaran pengadaan peralatan pemadam kebakaran.

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan informan kunci yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan anggaran dan pengadaan peralatan pemadam kebakaran. Informan terdiri dari pejabat struktural, pejabat perencanaan dan keuangan, serta personel operasional pemadam kebakaran. Karakteristik responden disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

No	Jabatan Responden	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pejabat Struktural (Kepala/Sekretaris/Bidang)	4	33,3
2	Pejabat Perencanaan dan Keuangan	3	25,0
3	Personel Operasional Pemadam Kebakaran	5	41,7
Total		12	100

Sumber: Data primer penelitian (2025)

Berdasarkan **Tabel 2**, mayoritas responden berasal dari personel operasional pemadam kebakaran. Hal ini memberikan perspektif yang penting terkait kesesuaian antara perencanaan anggaran dan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, keterlibatan pejabat struktural dan perencana anggaran memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap proses perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran.

Hasil Wawancara dan Temuan Penelitian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran pengadaan peralatan pemadam kebakaran telah mengikuti mekanisme formal perencanaan dan penganggaran daerah. Namun, sebagian besar informan menyatakan bahwa perencanaan tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada analisis kebutuhan operasional dan risiko kebakaran wilayah. Beberapa informan mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang membatasi pemenuhan kebutuhan peralatan, sehingga prioritas pengadaan sering kali ditentukan berdasarkan ketersediaan dana, bukan tingkat urgensi operasional.

Selain itu, informan dari personel operasional menyampaikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jenis dan jumlah peralatan yang direncanakan dengan kondisi lapangan. Kondisi geografis Papua Tengah yang sulit dijangkau membutuhkan peralatan khusus dan jumlah armada yang lebih memadai, namun hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam dokumen perencanaan anggaran. Ringkasan hasil wawancara disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara Penelitian

Aspek yang Dikaji	Temuan Utama
Proses perencanaan anggaran	Disusun sesuai mekanisme formal, namun belum sepenuhnya berbasis analisis kebutuhan dan risiko
Ketersediaan anggaran	Anggaran terbatas sehingga tidak semua kebutuhan peralatan dapat diakomodasi
Kesesuaian peralatan	Terdapat ketidaksesuaian jenis dan jumlah peralatan dengan kebutuhan lapangan
Proses pengadaan	Prosedur relatif panjang dan mempengaruhi ketepatan waktu pengadaan
Dampak terhadap pelayanan	Keterbatasan peralatan berpengaruh pada efektivitas respons kebakaran dan bencana

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran pengadaan peralatan pemadam kebakaran di instansi yang diteliti telah mengikuti rangkaian mekanisme formal perencanaan dan penganggaran daerah, tetapi masih kurang komprehensif dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Temuan ini mendukung pendapat Robinson bahwa efektivitas perencanaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh keakuratan prosedural, tetapi juga oleh kesesuaian antara anggaran dan kebutuhan operasional (Robinson, 2020). Robinson menegaskan bahwa perencanaan anggaran yang efektif harus mampu mentransformasikan prioritas pelayanan menjadi alokasi sumber daya yang relevan secara operasional dan berbasis data kebutuhan.

Para informan juga mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan relatif terbatas, sehingga prioritas pengadaan sering kali didominasi oleh pertimbangan ketersediaan dana daripada urgensi operasional. Hal ini konsisten dengan temuan Panggalo et al. (2025), yang menyatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran dan kurangnya analisis kebutuhan dapat menghambat efektivitas pengadaan barang/jasa sektor publik, mengakibatkan alokasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Pandangan ini selaras dengan fokus penelitian ini, di mana alokasi anggaran menjadi faktor utama ketidakterpenuhannya kebutuhan peralatan khusus yang dibutuhkan di wilayah Papua Tengah.

Temuan lain menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jenis dan jumlah peralatan

yang direncanakan dengan kondisi operasional di lapangan. Personel operasional menyatakan bahwa peralatan yang tersedia belum mencukupi atau tepat sifatnya untuk karakteristik wilayah yang sulit dijangkau. Literasi akademik yang relevan mendukung temuan ini: Siagian et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam konteks respons darurat, perencanaan anggaran dan pengadaan harus mempertimbangkan karakteristik geografis, risiko bencana, dan kebutuhan respons cepat agar layanan tetap efektif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perencanaan saat ini kurang mengakomodasi dimensi risiko tersebut, sehingga kesenjangan antara kebutuhan riil dengan output pengadaan masih terjadi.

Temuan tersebut menjawab rumusan masalah kedua terkait kendala utama dalam perencanaan anggaran dan pengadaan, yaitu keterbatasan kemampuan instansi dalam melakukan analisis kebutuhan berbasis risiko serta tantangan prosedur dan koordinasi antarunit. Penelitian sebelumnya dari Adelia & Samukri (2025) telah mencatat bahwa lemahnya sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan implementasi pengadaan berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kendala proses internal turut mempengaruhi kesesuaian antara alokasi anggaran dan hasil pengadaan.

Lebih jauh, dengan hasil yang menunjukkan bahwa personel operasional mengalami hambatan dalam dukungan peralatan, penelitian ini memperkuat gagasan bahwa efektivitas perencanaan anggaran harus diukur bukan hanya berdasarkan realisasi anggaran, tetapi juga berdasarkan kemampuan anggaran tersebut memenuhi kebutuhan operasional yang bersifat spesifik. Pandangan ini sejalan dengan kerangka Mardiasmo et al. (2008) bahwa efektivitas anggaran publik mencakup dimensi kualitas output pelayanan, bukan sekadar volume pengeluaran.

Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya menegaskan konsistensi dengan literatur yang telah ada, tetapi juga memperluas kajian pada konteks perencanaan anggaran pengadaan peralatan pemadam kebakaran di daerah otonom baru dengan karakteristik geografis kompleks dan tantangan kelembagaan spesifik — suatu konteks yang relatif kurang tereksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan anggaran pengadaan peralatan pemadam kebakaran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada instansi yang diteliti telah disusun sesuai mekanisme formal perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, namun efektivitasnya masih terbatas dalam menjawab kebutuhan riil pelayanan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.

Temuan utama penelitian mengungkapkan bahwa keterbatasan alokasi anggaran, lemahnya analisis kebutuhan berbasis risiko, serta kompleksitas prosedur pengadaan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas perencanaan anggaran. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara jenis dan jumlah peralatan yang direncanakan dengan tuntutan operasional di wilayah Papua Tengah yang memiliki karakteristik geografis dan tingkat risiko kebakaran yang beragam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan anggaran tidak cukup diukur melalui tingkat realisasi anggaran semata, tetapi harus dilihat dari sejauh mana hasil pengadaan mampu mendukung kinerja pelayanan publik dan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran. Dengan demikian, perencanaan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan lapangan dan risiko wilayah menjadi prasyarat penting bagi peningkatan kualitas layanan keselamatan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat literatur mengenai manajemen keuangan publik dengan menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan anggaran, analisis kebutuhan, dan manajemen pengadaan dalam konteks layanan publik berisiko tinggi. Secara praktis, temuan penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi antarunit, meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan risiko, serta menyesuaikan prioritas anggaran dengan karakteristik wilayah guna meningkatkan efektivitas pengadaan peralatan pemadam kebakaran.

Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus

pada satu instansi pemerintah daerah, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas ke konteks daerah lain. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif hubungan antara perencanaan anggaran, pengadaan, dan kinerja pelayanan pemadam kebakaran. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dengan cakupan wilayah yang lebih luas, serta memasukkan indikator kinerja pelayanan dan analisis risiko kebakaran secara lebih terukur guna memperkaya dan memperkuat temuan empiris di bidang pengelolaan anggaran sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, D., & Samukri, S. (2025). The Impact of Budget Planning and Procurement of Goods and Services on the Absorption of Local Budget Expenditure. *International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE)*, 4(4), 2293–2306. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v4i4.206>
- Aisyah, J. N., Aulia, M. A., A'yuni, Q., & Mu'alimin. (2024). Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 147–155. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i4.392>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Christofer, J., & Darmawati, D. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Revisi Anggaran, Kompetensi SDM, dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 1671–1681. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1785>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed). SAGE Publications.
- Karikarti, K., Lambe, K. H. ., & Baharuddin, B. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran : Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Good Governance dalam Penggunaan. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/1051>
- Mardiasmo, D., Barnes, P., & Sakurai, Y. (2008). Implementation of Good Governance by Regional Governments in Indonesia: The Challenges. *Proceedings Contemporary Issues in Public Management: The Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM XII)*, 1–36. <https://eprints.qut.edu.au/15321/1/15321.pdf>
- Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 2(1), 45–51. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226>
- Memon, M. A., Ramayah, T., Ting, H., & Cheah, J. (2025). PURPOSIVE SAMPLING: A REVIEW AND GUIDELINES FOR QUANTITATIVE RESEARCH. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 9(1), 1–23. [https://doi.org/10.47263/JASEM.9\(1\)01](https://doi.org/10.47263/JASEM.9(1)01)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Nirwayadhi, P. I., & Trisna Dewi, N. A. . (2025). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada OPD Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 15(2), 371–385. <https://doi.org/10.23887/jiah.v15i2.100846>
- OECD. (2019). *OECD Good Practices for Performance Budgeting*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c90b0305-en>
- OECD. (2025). *Government at a Glance 2025*. <https://doi.org/10.1787/0efd0bcd-en>
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>

- Pangaribuan, D.-. (2019). Governance Practices Government, of Accountability Performance and Implementation of Risk Management to Fraud Detection and Prevention. *International Journal of Contemporary Accounting*, 1(2), 75–98. <https://doi.org/10.25105/ijca.v1i2.6167>
- Panggalo, A., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo : Peran Sistem LPSE Dalam Meningkatkan Proses Pengadaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 70–78. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/992/824>
- Patton, M. . (2015). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. SAGE Publications Inc.
- Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308>
- Puluala, M. G. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i1.5>
- Rakhman, A. A. (2022). Pengembangan Konsep Formulasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.12>
- Randan, F., Todingbua, M. A., & Buku, A. (2025). Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana / Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 101–107. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/864/712>
- Robinson, M. (2007). *Performance budgeting: Linking funding and results*. New IMF Book. <https://doi.org/10.5089/9781589066671.071>
- Robinson, M. (2020). *Public Budgeting in Practice: Experiences of Local Government*. SAGE Publications.
- Siagian, A., Harmain, H., & Syarvina, W. (2024). Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan. *JEAP: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1(4), 115–128. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i4.411>
- Sugiyono. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tandibua, S. T., Pasae, Y., & Baharuddin. (2025). Analisis Kinerja Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.294>
- Wamuar, D. A., Rantererung, C. L., & Ba'ka, A. (2025). INOVASI PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PELAYANAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 67–73. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/859>
- Yin, R. . (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed). SAGE Publications.